



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Perbaiki Kebijakan Jaklingko Mikrotrans

JAKARTA, KOMPAS — Ratusan sopir Mikrotrans menggelar demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024). Massa menyerukan beberapa tuntutan, antara lain tentang batas usia angkutan umum Jakarta serta perbaikan mekanisme pengupahan. Aksi ini mengakibatkan 29 rute layanan Mikrotrans tak beroperasi sepanjang Selasa.

Terkait batas usia kendaraan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, hanya kendaraan berumur maksimal 10 tahun yang bisa dijadikan angkutan umum di Jakarta.

Massa mengenakan seragam biru muda Jaklingko di depan Balai Kota. Mereka membawa sejumlah bendera kecil dari sejumlah perkumpulan sopir Jaklingko Mikrotrans. Sebagian anggota massa berdiri sembari berteriak di atas mobil orasi yang terparkir persis di depan Balai Kota. Adapun sejumlah spanduk bertuliskan "Hari ini kami ada di sini karena ketidakmampuan pimpinan Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI sewenang-wenang dan tidak adil" juga terpasang di depan Balai Kota.

Salah satu perwakilan pengunjuk rasa dari Komilet Jaya, Jhon Kenedy, mengatakan, salah satu tuntutan aksi unjuk rasa adalah mengenai upah yang diterima para sopir. Sebab, upah para sopir tergantung pada perjalanan mengangkut penumpang atau target kilometer perjalanan.

Namun, kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai. Dengan demikian, aksi ini menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar membenahi mekanisme upah mereka. "Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator Jaklingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 kilometer setiap hari," ujarnya.

Adapun target kilometer itu disebut Jhon tidak pernah tercapai. Hal ini pun berdampak pada gaji mereka yang tidak penuh, bahkan di bawah upah minimum provinsi (UMP) Jakarta. Upah yang mereka terima sekitar Rp 4,6 juta per bulan lebih kecil dari UMP DKI sebesar Rp 5,06 juta per bulan.

"Terkait upah kami, saat ini upah kami sangat jauh di bawah

yang layak. Kemudian, keterlambatan (pembayaran gaji) juga sering dialami, padahal kebutuhan sehari-hari sangat mendesak," ucap Jhon.

Adapun Mikrotrans merupakan salah satu moda transportasi berupa mobil angkutan perkotaan (angkot) yang terintegrasi dalam sistem Jaklingko. Sejak 2018, angkutan berwarna putih biru dan tulisan biru itu menjadi bagian dari armada Transjakarta yang ditujukan sebagai angkutan penumpang atau penghubung dengan transportasi publik lain.

Dalam kesempatan ini, massa juga menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahannya. Selain berunjuk rasa, sejumlah Mikrotrans sejak pagi ini juga dikabarkan mogok beroperasi. Masyarakat terganggu mobilitasnya karena layanan 29 rute Mikrotrans terhenti.

Pendemo lainnya, Fahrul Fatah, mengatakan, aksi ini ditujukan pula sebagai bentuk protes atas dugaan diskriminasi yang dilakukan terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko. Transjakarta diduga mengancam operator tertentu.

"Direksi Transjakarta mengancam satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota DPRD DKI. Banyak kesalahan mereka yang selalu ditoleransi dan memberikan kemudahan lainnya," ucapnya.

Kemudian, berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No 66/2019 serta berdasarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Jaklingko Mikrotrans, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah 6.360 unit. Namun, hingga saat ini, populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

"Dari angka persentase tersebut, dari 11 operator mitra program Jaklingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak serta serapan paling banyak. Transjakarta terus saja memberikan kuota kepada operator tersebut

dengan mudah," ujar Fahrul.

Ia menyebut, dalam aksi kali ini, terdapat delapan koperasi mitra operator program Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB), yakni Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, PT Kencana Sakti Transport.

Evaluasi

Heru Budi Hartono mengaku sudah mengetahui dari beberapa hari yang lalu bahwa akan ada demonstrasi di depan kantornya. Namun, ia tidak menemui para demonstran tersebut. Terlebih pada Selasa pagi, ia sudah dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat.

"Tapi saya sudah bicara dengan pihak Transjakarta dan dinas perhubungan. Saya meminta mereka memetakan permasalahan yang ada. Saya juga meminta Kepala Dinas Perhubungan agar bertemu dengan pengunjuk rasa," kata Heru di SDN Cideng 07, Selasa pagi.

Adapun Heru menyebut, gaji para sopir Mikrotrans saat ini bukan berdasarkan banyaknya penumpang yang dibawa, melainkan berdasarkan hitungan kilometer atau jarak tempuh dalam waktu kerja mereka.

"Kalau per kilometer, kan, sudah bagus, ya. Kenapa sampai begitu (demonstrasi). Saya nanti tanya dulu dan menyuruh Kepala Dinas Perhubungan untuk evaluasi," katanya.

Pada Selasa siang, para perwakilan sopir dari sejumlah operator diperkenalkan masuk ke Balai Kota untuk menghadap pihak Dinas Perhubungan DKI. Ketua Forum Komunikasi Laskar Biru Berman Limbong menyebutkan, ada dua tuntutan yang disampaikan para sopir Jaklingko Mikrotrans kepada jajaran direksi Transjakarta dan Dinas Perhubungan Jakarta dalam aksi unjuk rasa hari ini.

"Hari ini kami menyuarakan dua hal, (pertama) nasib angkutan yang masih reguler, dan (kedua) nasib daripada kelangsungan Jaklingko Mikrotrans," ujar Berman Limbong.

Menurut Berman, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo telah memberikan solusi atas tuntutan yang pertama. Untuk angkot reguler

berusia di atas 10 tahun, Kadishub disebut memberikan toleransi satu tahun boleh beroperasi sebagai bagian Mikrotrans Jaklingko. Syaratnya, harus tetap uji KIR.

"Untuk tuntutan keadilan bagi para operator atau sopir Jaklingko Mikrotrans masih akan dibahas," katanya.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpendapat, pendapatan sopir sudah semestinya harus di atas UMP. Dengan upah berdasarkan jarak, sopir terdorong kebut-kebutan saat bekerja karena mengejar target kilometer.

"Jadi baiknya upah berdasarkan basis UMP agar pelayanannya juga lebih baik. Jika sopir melebihi target, bisa mendapatkan bonus. Nanti skenarionya dapat dihitung lagi," papar Deddy.

Adapun pihak Dinas Perhubungan atau Transjakarta belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini.

Para pengunjuk rasa tetap berharap tuntutan bakal dipenuhi oleh pihak terkait. Mereka membubarkan diri setelah beraksi sejak pukul 07.30 WIB hingga 12.10 WIB. Pengunjuk rasa memarkirkan semua kendaraannya di depan Balai Kota DKI dan memutuskan untuk tidak beroperasi. Imbas demonstrasi ini, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Balai Kota DKI, macet dan tidak dapat dilalui kendaraan. "Untuk pengamanan aksi unjuk rasa, kami melibatkan 979 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, instansi terkait, dan personel lain. Aparat kepolisian ditempatkan di sejumlah lokasi sekitar Jalan Merdeka Selatan. Personel ditempatkan untuk melakukan pengamanan sekaligus mencegah massa masuk ke dalam Balai Kota DKI Jakarta.

Susatyo menyatakan, semua personel yang terlibat pengamanan mengedepankan tindakan persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

(TIK)